



11 TAHUN UUK DIY 'KAISTIMEWAN ADHEGANING AMERTA' Sarana Kembali ke Jatidiri dan Identitas Budaya

KULONPROGO (KR) - Peringatan 11 tahun Undang-Undang Keistimewaan (UUK) DIY tahun ini untuk pertama kalinya tidak diselenggarakan di Kota Yogyakarta melainkan dipusatkan di Lapangan Secang, Sendangsari, Pengasih, Kulonprogo, selama tiga hari, Selasa-Kamis (29-31/8). Acara yang digelar Paniradya Kaistimewan DIY bersama Sekber Keistimewaan DIY ini dikemas dalam 'Panggung Rakyat Gebyar Keistimewaan'.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam sambutan yang dibacakan Wakil Gubernur DIY KGPA Paku Alam X mengatakan, peringatan 11 Tahun Undang-Undang Keistimewaan, hendaknya menjadi sarana untuk kembali ke jatidiri dan identitas budaya. Tepat kiranya apabila kita merenungi makna tarikh Jawa 'Wiyata Gati Pambukaning Budi', yang merefleksikan semangat kearifan lokal sebagai pemandu batin dan pikiran, demi mencapai tatanan masyarakat yang *mulat sarira dan tepa sarira*, berlandaskan pada solidaritas sosial.

Dikatakan, ada ungkapan Jawa tentang Desa yang menyatakan 'Desa mawa Cara, Negara mawa Tata'. Di masa kini terejawantahkan dalam UU Otonomi Desa No 6 Tahun 2014, yang memberikan kewenangan desa secara luas untuk dapat mengatur 'cara' dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tetapi tidak berarti keluar dari sistem ke-tata-negaraan NKRI.

Sebelumnya dilandasi oleh UU Keistimewaan DIY No 13 Tahun 2012, sehingga UU Desa itu menjadi lebih spesifik dalam arti ada pe-



SEBELAS TAHUN
UNDANG-UNDANG KEISTIMEWAAN DIY

rubahan mendasar dari Pangreh Praja menjadi Pamong Praja.

"Saya bersyukur dan mengapresiasi, karena di DIY sudah banyak desa berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga menjadi kuat, maju, mandiri, kredibel, dan demokratis. Kondisi ini bisa menjadi landasan yang kuat dalam pelaksanaan tata kelola desa yang transparan dan akuntabel, modal awal menuju tatanan masyarakat baru," kata Gubernur.

Sedangkan Paniradya Pati Kaistimewan DIY Aris Eko Nugroho SP MSi mengatakan, peringatan 11 tahun UUK DIY bisa menjadi momentum kita semua untuk introspeksi diri menyangkut apa saja yang sudah dijalani bersama, untuk kesejahteraan masyarakat dalam

mencapai lima tujuan keistimewaan.

"11 tahun UUK DIY telah cukup memberikan pondasi yang kuat untuk menuju tercapainya tujuan keistimewaan ke level yang lebih tinggi, yaitu mewujudkan mulia-an dan kejayaan keistimewaan DIY, sebagaimana dicita-citakan oleh para leluhur bumi Mataram," katanya.

Aris mengatakan, 11 tahun UUK DIY ini bertema 'Kaistimewan Adheganing Amerta', yang mempunyai makna keistimewaan Yogyakarta yang sangat luas untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya dan tradisi Jawa serta peningkatan pembangunan secara luas.

Dalam hal ini, lanjut Aris, Pemerintah Daerah DIY bersama dengan lapisan masyarakat mengedepankan konsep sinergi dan kolaborasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui reformasi birokrasi dan reformasi pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tujuan dari keistimewaan DIY.

Hal ini dapat diartikan, dengan hadirnya Undang-Undang Keistimewaan yang pada saat ini sudah berusia 11 tahun, harapannya Pemerintah Daerah DIY bersa-



Wakil Gubernur DIY KGPA Paku Alam X (kiri) memotong tumpeng dan diberikan kepada Paniradya Pati Kaistimewan DIY Aris Eko Nugroho SP MSi dan Pj Bupati Kulonprogo Ni Made Dwipanti Indrayanti ST MT.

ma dengan lapisan masyarakat bisa saling bersinergi dan berkolaborasi.

Sementara Ketua Sekber Keistimewaan DIY Widihasto Wasana Putra mengatakan, Panggung Rakyat Gebyar Keistimewaan dalam rangka memperingati 11 tahun Undang-Undang Keistimewaan DIY total melibatkan sekitar 500 pelaku seni dan kru pendukung serta pelaku usaha yang mayoritas dari Kulonprogo. Sendangsari Pengasih dipilih sebagai bentuk ajakan agar kita senantiasa memberikan perhatian lebih kepada penguatan ekosistem di pedesaan.

Widihasto mengingatkan kembali tentang tujuan keistimewaan yaitu antara lain mewujudkan ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat. Menjamin tata sosial berdasarkan ke-Bhinneka Tunggal Ika-an.

Melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya.

"Salah satu isu paling menonjol adalah mewujudkan ketenteraman dan kesejahteraan. Bagaimana betul-betul dan sungguh-sungguh

bijaksana sejak dalam perencanaan program," katanya.

Visi Sri Sultan HB IX dengan 'Tahta Untuk Rakyat' dan Sri Sultan HB X dengan 'Tahta Untuk Kesejahteraan Masyarakat' adalah panduan utama dalam merancang program-program kerakyatan. "Kiranya harapan-harapan mendasar ini memotivasi kita untuk dijawab dalam program implementasi keistimewaan hari ini esok dan mendatang," ujar Widihasto.

Didani dengan dana keistimewaan (danais) kegiatan Panggung Rakyat Ge-

byar Keistimewaan ini mengkolaborasi seni budaya dan UMKM. Panggung Rakyat Gebyar Keistimewaan dimeriahkan pertunjukan Wayang Wisata Istimewa, Ketoprak Keluarga Cantrik dan dimeriahkan Ngatmombilung, Bayu Madhuswara, Nyi Ageng Etnic, Extravagongso, Cokekanz Gejok Lesung, Jaranan Maheswari, Tari Angguk, Sendang Sari Band dan Lighting Show.

Panggung Rakyat Gebyar Keistimewaan disiarkan *live streaming* melalui *channel* YouTube Paniradya Kaistimewan DIY. (Wan/Dev)

KETUA KOMISI B DPRD DIY, ANDRIANA WULANDARI SE

Ayo Para Pelaku Usaha Mikro Kecil, 'Gas Pool'



FORUM
DPRD DIY

KEHIDUPAN perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) banyak disokong oleh usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Laporan dari Bappeda DIY menyebutkan peran UMKM lebih dari 60%. Meski banyak UMKM yang terkena dampak pandemi Covid-19, namun demikian, kelompok ini justru yang paling kuat untuk bertahan.

Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY, Andriana Wulandari SE mengapresiasi kinerja Pemda DIY melalui institusi terkait dengan sejumlah program penguatan usaha mikro, sehingga banyak yang dapat bertahan dari badai Covid-19. Tidak hanya itu, banyak pula bermunculan usaha baru selama pandemi terjadi.

Salah satu program yang menonjol dari Pemda DIY, yakni SiBakul. Program ini merupakan akronim dari Sistem Informasi Pembinaan Koperasi dan UKM DIY. SiBakul Jogja merupakan bentuk digitalisasi model Pembinaan Sirkular Dinas Koperasi dan UKM DIY bagi pelaku Koperasi dan UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam program ini juga memiliki andalan bagi pelaku UMKM, yakni Ongkos Kirim (Ongkir) gratis.

Namun demikian, capaian dalam pembinaan usaha mikro kecil tersebut belum lah maksimal, sehingga

jangan berpuas diri. Karena itu, pihaknya berharap Pemda DIY terus berupaya meningkatkan perannya dalam penguatan usaha mikro ini. Termasuk dalam peningkatan keterjangkauan dalam penguatan usaha, khususnya usaha mikro.

"Karena kami melihat masih banyak yang belum tersentuh tangan-tangan pemerintah melalui program-programnya," ujar Andriana Wulandari yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan.

Banyak faktor yang menyebabkan ketidakterjangkauan tersebut. Di antaranya, lokasi usaha hingga pelaku usahanya yang pasif. Yakni sudah puas dengan kondisi usahanya yang dijilani, padahal potensial untuk dikembangkan lebih lanjut.

Meski pandemi telah usai, semangat kebangkitan masyarakat Yogyakarta yang istimewa terus digelorkan di dunia usaha mikro. Momentum kebangkitan ekonomi ini harus terus ditindaklanjuti dengan semakin banyak para pelaku usaha mikro yang terlibat dalam program yang diberikan pemerintah.

Andriana Wulandari mengungkap realita yang terjadi ketika pandemi Covid-19. Saat usaha banyak terpuruk, namun banyak bermunculan usaha mikro di tengah-tengah masyarakat. Kemunculan karena akibat himpitan ekonomi, suami kena pemutusan hubungan kerja (PHK), usaha yang digelut bangkrut, sehingga mau tidak mau terpaksa harus berbuat untuk keluar dari problem ekonomi keluarga.

Keterjangkauan Program
"Keterpaksaan ini memunculkan banyak perempuan menjadi pengusaha yang hasil produksinya dijual secara online," ujar Andriana Wulandari mencontohkan, selalu ada jalan untuk



Andriana Wulandari SE

Kredit UMKM	Share		Pertumbuhan (yoy)		Tren 2 Tahun Terakhir
	2022 Tw II	2021 Tw II	2022 Tw I	2021 Tw I	
Kredit UMKM	100.0%	7.87	21.00	23.22	▲
UMKM Mikro	45.2%	-22.90	123.28	133.64	▲
UMKM Kecil	36.9%	18.73	30.45	27.47	▼
UMKM Menengah	17.9%	27.55	-45.05	-45.49	▼

Sumber: Bank Indonesia

bangkit.

Guna meningkatkan keterjangkauan dalam pemberdayaan usaha mikro, Pemda DIY melalui Dinas terkait untuk gencar melakukan pendataan yang lebih rinci terkait usaha mikro sampai ke ranah bawah. Harapannya, program kebangkitan UMKM dapat dirasakan pelaku yang lebih banyak lagi.

Di samping terus melakukan sosialisasi tentang pentingnya para pelaku usaha mikro terdapat sehingga dapat menjangkau program pemberdayaan, juga kapasitas mereka dalam menjalankan usaha, perlu ditingkatkan, baik terkait pendirian

usaha, perijinan, penguatan manajemen, pemasaran hingga akses permodalan. "Ayo kalau kamu memang sebagai pelaku usaha baru, atau mau bangkit, segera mendaftarkan di dinas terkait," ajak Andriana Wulandari.

Pentingnya masuk pendataan ini, karena bagi mereka yang belum begitu paham mengenai mengelola usaha dengan baik, dinas terkait, dapat memberikan pendampingan.

Andriana Wulandari mengingatkan kembali pentingnya sosialisasi, karena ia melihat masih banyak pelaku usaha mikro pasrah, puas dengan kondisi usaha yang ada. Padahal potensi untuk

berkembang sangat besar.

"Produk yang diproduksi sudah terjual di masyarakat sekitar sudah puas. Padahal melihat potensi produknya, bisa dipasarkan dengan jangkauan yang luas, sehingga dapat meningkatkan pendapatan," ujarnya.

Meski sudah banyak yang mengetahui program Pemda DIY, SiBakul, Gratis Ongkir dan lain-lain, namun masih harus disosialisasikan terus. Agar kemanfaatannya di masyarakat, khususnya para pelaku usaha bisa lebih banyak yang merasakan.

Keberpihakan DPRD DIY
Mengenai keberpihakan

DPRD DIY dalam pemberdayaan usaha mikro, Andriana Wulandari memastikan support legislatif untuk kepentingan program prorakyat. Sebagai institusi yang diberikan kewenangan budgeting (anggaran), maka program pemberdayaan UMKM, menjadi prioritas untuk didukung. Apalagi program tersebut, memberikan dampak pada pengentasan kemiskinan.

Terkait masih banyaknya keluhan permodalan, maka bank milik DIY, yakni Bank BPD DIY sangat penting perannya dalam meningkatkan akses pelaku usaha mikro di DIY. "Kami ingin mendorong, Bank BPD DIY selain meningkatkan kucuran permodalan, juga membantu pendampingannya," ujarnya.

Tidak sedikit masyarakat yang tidak mengetahui betul tentang simpan pinjam guna mendukung usaha mereka. Tidak hanya itu, masih ada rasa takut untuk berurusan dengan bank. Sehingga kurang berminat untuk mengajukan pinjaman demi kemajuan usahanya. Padahal, ada skema pinjaman yang membantu dalam memberdayakan usahanya.

Komisi B DPRD DIY berharap, sosialisasi tentang program penguatan usaha mikro kecil ini bisa sampai pedesaan. Untuk dapat terlaksana, membutuhkan kreativitas dan inovasi, sehingga para pelaku usaha di tingkat desa dapat ikut merasakan sentuhan dari program kebangkitan usaha mikro. Jika mereka ikut terjerang dalam program tersebut, maka Andriana yakin dapat berdampak dalam pengentasan kemiskinan di pedesaan.

"Pastinya, ini bisa terwujud, membutuhkan sinergi, dari Pemda DIY, Pemkab Kabupaten, Kapanewon hingga Kalurahan dan RT. Tidak hanya itu, bisa menggunakan jalur organisasi Dasawisma, pemberdayaan perempuan, hingga kelompok PKK," tambahnya.

Dari sekian program pemberdayaan UMKM di DIY, Andriana memberi cata-

tan positif untuk Program Ongkir Gratis yang telah berguna bagi membantu usaha mikro kecil, termasuk selama masa pandemi Covid-19. "Untuk ke depannya, program ini sebaiknya diteruskan, karena telah terbukti manfaatnya," ujarnya.

Pengentasan Kemiskinan

Diakui, banyak desa yang menjadi kantong kemiskinan, tetapi potensial dikembangkan menjadi desa wisata. Jika potensi yang dimiliki dikembangkan, dapat membawa dampak positif bagi pengentasan kemiskinan. Karena itu, Andriana mendorong kepada Pemda DIY memasukkan program pengentasan kemiskinan di daerah potensi desa wisata masuk dalam APBD DIY. Di samping itu, juga berharap Dana Keistimewaan (Danais) bisa dikurangkan untuk keperluan pengembangan desa wisata yang masyarakatnya banyak yang masih berada di garis kemiskinan.

Pendampingan kepada masyarakat menjadi penting, karena tidak menutup kemungkinan, warga di pedesaan yang tertinggal secara ekonomi tidak mengetahui potensi yang dimiliki desa. Kalau pun sudah mengetahui potensinya, tidak mengetahui lebih jauh akses bantuan yang dapat diperoleh dari institusi pemerintah.

"Pendampingan itu misalnya ketika desa ini potensi ekonomi di pertanian, maka pendampingan akan memberikan masukan hingga menggerakkan untuk menggarap potensi pertanian, dan berupaya membuka peluang mendapatkan bantuan pemberdayaan, atau fasilitas pendukung untuk pengembangan pertanian dari institusi yang terkait," jelasnya.

Menyikapi terus tumbuhnya perekonomian di DIY, Andriana Wulandari mengajak kepada para pelaku usaha mikro, termasuk kaum muda untuk melakukan penguatan diri. "Ayo Gas Pool, bangkit." (*)

Simak juga wawancara di:

krjogja.com



krjogja.com



Kedaulatan Rakyat
@krjogjadotcom



TikTok
Kedaulatanrakyat
Kedaulatan rakyat Media



YouTube Kedaulatan Rakyat TV